



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Menurut data yang dihimpun dari laman kemdikbud.go.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didirikan sejak awal kemerdekaan pada tahun (1945-1950) dengan nama Kementerian Pengajaran. Pada saat itu memiliki semangat yang menggelora untuk membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Menteri pertama dijabat oleh Ki Hadjar Dewantara yang mengeluarkan instruksi untuk mewajibkan sekolah mengibarkan bendera merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Jabatan menteri selanjutnya dilanjutkan oleh Mr. Mulia pada Kabinet Syahrir 1 yang meneruskan kebijakan Menteri sebelumnya di bidang kurikulum kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana Pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Jabatan Menteri dilanjutkan Muhammad Sjafei hingga 2 Oktober 1946, kemudian Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Mr. Soewandi pada saat itu membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dengan ketua Ki Hadjar Dewantara yang bertujuan melakukan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Pada era demokrasi liberal (1951-1959) terjadi tujuh kali pergantian kabinet dengan kebijakan yang paling menonjol yaitu adanya payung hukum di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Di era demokrasi terpimpin (1959-1966) berakhir era demokrasi parlementer. Dalam Kabinet

Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda yang dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kultural, Menteri Muda PP dan K, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat.

Di era orde baru (1966-1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, terjadi perubahan yang banyak dan beragam dalam arah kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan dan lain-lain.

Era orde baru sampailah pada akhir perjalanannya, dilanjutkan era reformasi (1998-2011). Pada kabinet pertama era reformasi hasil pemilu 1999 yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan Menteri Dr. Yahya Muhaimin. Pada Kabinet Indonesia Bersatu era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Pada tahun 2011 istilah departemen diubah menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang Pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kebijakan pendidikan antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.



Gambar 2.1 Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

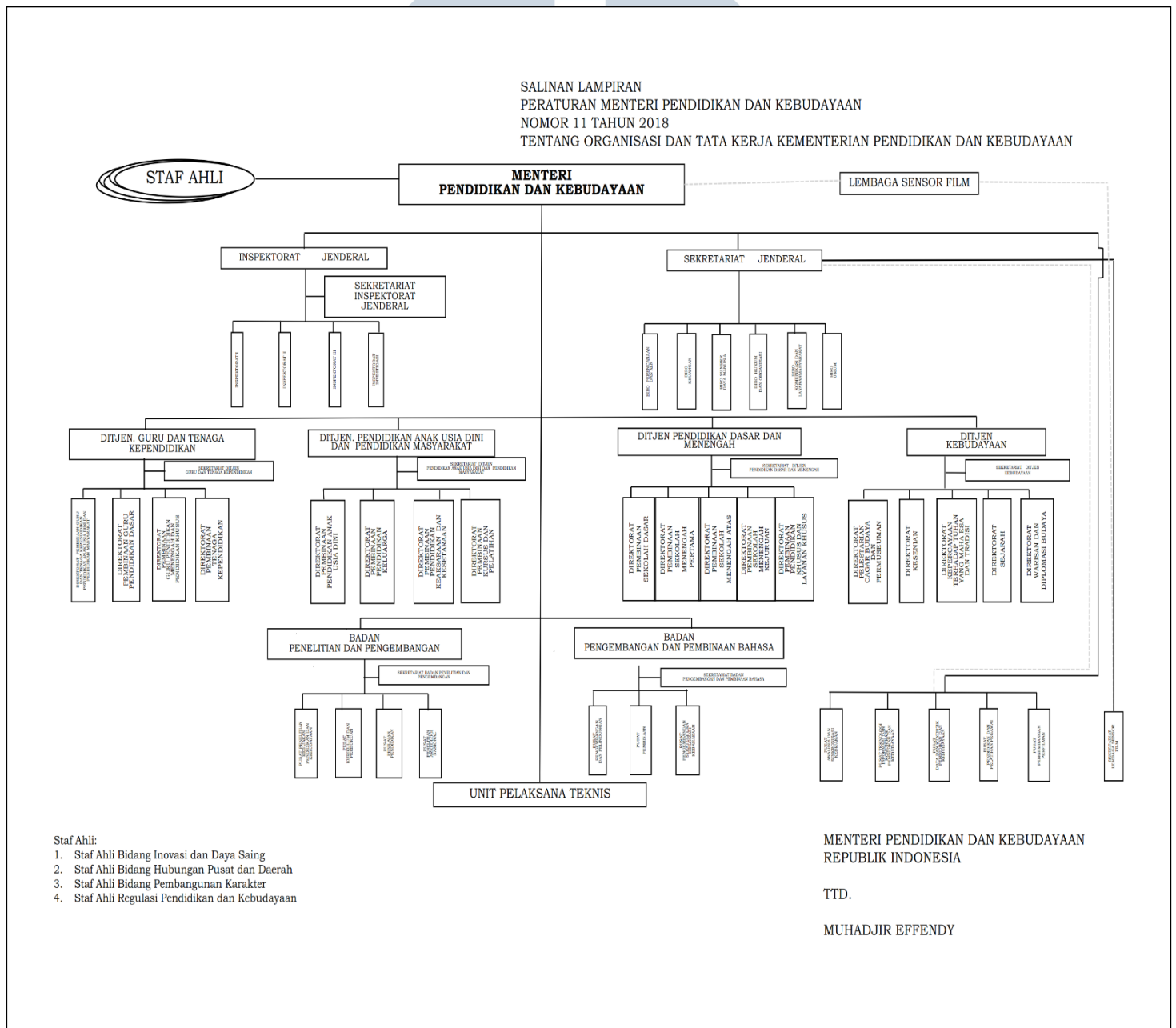
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Visi: Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong
- Misi:
 1. Mewujudkan pelaku Pendidikan kebudayaan yang kuat
 2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018. Menteri

sebagai penanggung jawab utama memiliki badan-badan organisasi di bawahnya yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda serta bertanggungjawab langsung kepada menteri. Kerja magang dilaksanakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Subbagian Tata Laksana, Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian, dengan tugas membuat sistem informasi berbasis web bagi Subbagian Tata Laksana.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Website kemdikbud.go.id, 2018)